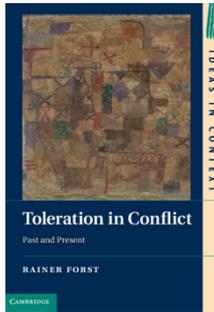


## BOOK REVIEW



Judul Buku : *Toleration in Conflict: Past and Present*  
Penulis : Rainer Forst  
Translator : Ciaran Cronin  
Penerbit : Cambridge University Press  
Tebal : xiv + 635  
Tahun : 2013  
ISBN : 978-0-521-88577-5

### TOLERANSI: DARI PENGALAMAN SEJARAH MENUJU KONSTRUKSI TEORITIS

Oleh: M Nur Prabowo S

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: [mnurpsb@gmail.com](mailto:mnurpsb@gmail.com)

Toleransi bukan hanya menjadi problem satu kelompok masyarakat atau budaya tertentu, tapi menjadi problem kemanusiaan-universal. Toleransi juga bukan problem zaman sekarang, tapi sudah menjadi problem segala zaman sejak klasik hingga kontemporer.

Di tengah situasi masyarakat yang plural dan rentan konflik, dibutuhkan terobosan kebijakan yang mendukung gagasan toleransi. Toleransi yang dimaksud bukan sebagai jargon semata, tapi juga sebagai pandangan teoritis yang lebih serius. Ini merupakan bagian dari kerja akademisi, yakni bagaimana toleransi harus dikonstruksikan sebagai bangunan teoritis yang kuat. Dalam hal ini, perlu

dibangun rumusan yang definitif mulai: Apa sesungguhnya yang disebut toleransi? Apa ide substantif dari toleransi? Apa nilai-nilai atributif dalam toleransi? Bagaimana ekspresi toleransi? Bagaimana prinsip-prinsip toleransi? Dalam hal ini, buku yang ditulis oleh Rainer Forst ini, seorang filsuf politik Jerman kontemporer, merupakan salah satu jawaban paling sistematis dan komprehensif terhadap problem toleransi.

Buku setebal hampir 650 halaman ini ditulis oleh seorang filsuf politik yang berasal dari latar belakang tradisi kritis di Jerman, salah satu generasi mutakhir madzhab Frankfurt pasca Jurgen Habermas. Sebagai seorang filsuf politik

yang populer, ia dinobatkan sebagai “salah satu pemikir terpenting pada generasi sekarang”. Reiner Forst sendiri dibimbing oleh Habermas ketika meraih doktoralnya, dan kini ia aktif sebagai profesor filsafat politik di Johann Wolfgang Goethe University. Pemikirannya terfokus pada isu-isu tentang keadilan sosial dan politik, toleransi, dan teori-teori politik. Forst juga menjabat sebagai direktur dalam kluster penelitian interdisipliner tentang “Formation of Normative Order” di Goethe University, yang mengantarkannya sebagai peneliti top dan pada tahun 2012 memperoleh hadiah nobel Gottfried Wilhelm Leibniz Prize, sebuah penghargaan tertinggi bagi seorang peneliti di Jerman. Dengan demikian, buku ini bukan saja menarik karena porsi halamannya yang tebal yang menunjukkan kekayaan ide dan literatur, tetapi juga karena otoritas keilmuan penulisnya yang tidak diragukan sehingga menunjukkan substansi pemikiran yang layak untuk dijadikan rujukan dan bahan diskusi terkait isu toleransi.

### **Pengandaian Dasar terhadap Toleransi**

Judul buku ini *Toleration in Conflict: Past and Present* mengandung beberapa pengandaian dasar tentang sikap toleransi.

Pertama, bahwa toleransi berarti sikap atau pandangan yang selalu dihadirkan pada saat terjadi situasi konflik sosial.

Dan, bukan bermaksud menghilangkan atau menyelesaikan konflik secara kodrati, tetapi sikap toleran lebih menunjukkan ekspresi untuk saling menghormati meskipun dalam suasana yang dipenuhi dengan rentangan perbedaan yang ada, terkait keyakinan, kepentingan, kebiasaan, bahkan perbedaan alamiah sekalipun. Sikap toleransi juga ditunjukkan dengan kerelaan untuk bersikap rendah hati terhadap hal-hal, khususnya terkait pengendalian sikap dan tindakan, yang secara potensial sebetulnya bisa sangat represif.

Kedua, bahwa tuntutan untuk bersikap toleran bukan muncul pada situasi di luar pertentangan sosial, melainkan muncul di dalam situasi pertentangan itu, sehingga ekspresi toleransi selalu terikat dengan konteks sosial dan historis. Secara struktural, sikap toleransi bukan diperlukan oleh pihak yang tidak bertikai, tetapi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Sikap toleran tidak menuntut sikap netral, tetapi menjalin fondasi normatif tertentu agar supaya ekspresi toleransi yang saling menguntungkan (*mutual toleration*) dapat diwujudkan, dan berusaha untuk mempertahankan relasi kekuasaan yang ada dengan cara menjamin kebebasan.

Ketiga, toleransi bukan hanya menjadi kebutuhan masa konflik, atau kontroversi sosial tertentu, melainkan pengertian toleransi itu sendiri sebenarnya tidak jelas dan kontroversial. Artinya,

toleransi itu sendiri menjadi objek konflik. Apa yang dimaksud toleransi itu sendiri menimbulkan perbedaan pemahaman, sedari dulu hingga sekarang. Bahkan mungkin, sesuatu yang dianggap sebagai ekspresi toleransi oleh segolongan masyarakat, dianggap sebagai intoleransi oleh kelompok lain. Lebih dari itu, terdapat pertanyaan pula, apakah toleransi itu selalu baik dalam dirinya sendiri. Multiinterpretasi toleransi tersebut, misalnya: bagi satu pihak, toleransi merupakan tuntutan moralitas, baik oleh Tuhan, akal, konsensus, maupun kebijakan; tapi di lain pihak, sikap tersebut dipandang sebagai sikap yang rendah diri, paternalistik, tapi sesungguhnya mengandung gestur yang represif. Bagi satu pihak, sikap toleran adalah ekspresi kepercayaan diri dan suatu bentuk karakter yang baik; tapi bagi pihak lain, dianggap sebagai kelemahan jiwa, sikap permisif, dan tidak memberi kenyamanan dan keamanan. Bagi satu pihak, sikap toleran adalah menghormati orang lain, bahkan memberikan penghargaan terhadap orang yang asing sekalipun; bagi sebagian orang, sikap seperti itu justru merupakan bentuk pengabaian, acuh tak acuh, tindakan isolasi, dan kebodohan.

Keempat, terdapat perbedaan pendapat tentang konsepsi toleransi. Perbedaan pendapat tersebut telah berkembang sepanjang sejarah, warna dan variasi konsepsi toleransi bahkan bertentangan

satu sama lain, baik pada masa lalu maupun sekarang. Dan bukan hanya konsepsi tentang apa itu toleransi, tapi juga justifikasi bagi sikap toleran itu pun bervariasi. Ada justifikasi yang berasal dari dalil keagamaan, dari kebijakan pragmatis politis, ada justifikasi epistemologis, justifikasi etis, justifikasi moral spesifik, seperti deontologis, keutamaan, dan lain sebagainya. Setiap justifikasi itu pun juga banyak yang mengandung pertentangan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, konsepsi mengenai apa sesungguhnya dan atas dasar apa sikap toleran itu dikatakan baik dan benar itu masih selalu diperdebatkan dan diselidiki.

Kontestasi “penyelidikan tentang hakikat toleransi” ini masih terus berlangsung oleh para filsuf, seperti filsuf Yunani Antik, Stoa-helenis, filsuf modern seperti Voltaire, Hume, Locke, hingga kontemporer seperti Marcuse dan Habermas. Forst ingin melanjutkan diskursus ini, dengan melakukan dua hal untuk menulis suatu magnum tentang toleransi. Pertama, ia melacak dan merekonstruksi diskursus politik dan filosofis tentang toleransi sejak zaman klasik. Ia ingin membangun fondasi historis dan menguatkan bahwa toleransi sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat dengan ekspresi yang beragam. Ia hendak membuktikan bahwa justifikasi, praktik, dan aplikasi toleransi sesungguhnya beraneka ragam, sejak masa Stoisme dan

awal pengaruh Kristianisme hingga saat ini. Yang kedua, ia mencoba mengembangkan sebuah teori yang sistematis tentang toleransi di dalam konflik untuk kondisi masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, buku *Toleration in Conflict: Past and Present* ini berisi dua bagian. Bagian pertama tentang diskursus toleransi dalam sejarah, dan bagian kedua tentang konstruksi teoritis tentang toleransi. Bagian pertama (p. 17-404) merupakan penyelidikan historis Forst tentang “justifikasi toleransi” sepanjang sejarah (*history of justifications*), dan bertujuan menyusun dan mengembangkan pandangan yang sistematis tentang justifikasi toleransi. Baginya, konsep toleransi itu tunggal, tetapi konsepsi tentang toleransi, atau sebagai gagasan, artinya pandangan para tokoh tentang toleransi beserta justifikasinya, itu sangat beragam.

### **Toleransi dalam Pengalaman Sejarah**

Forst pada bagian pertama ini juga menjelaskan, bahwa dari perspektif sejarah, diskursus dan konsepsi tentang toleransi secara general dapat dibagi menjadi dua perspektif: perspektif vertikal, yang dibangun di atas teori negara; dan perspektif horisontal, yang dibangun di atas teori intersubjektivitas. Dipandang dari perspektif vertikal dalam bingkai teori

negara, toleransi dipahami sebagai praktik politik, kebijakan negara, yang tujuannya adalah menjamin kebebasan, ketertiban publik, stabilitas keamanan, hukum dan konstitusi, dan sehingga juga kekuasaan. Sementara dari perspektif horisontal, toleransi dipahami sebagai sikap perilaku dan kebajikan seseorang terhadap orang lain, terhadap komunitas minor, kaum difabel, kaum marginal, dan lain sebagainya. Toleransi dianggap sebagai sikap yang paling bijak, sebagai bentuk respon terhadap pertentangan akibat perbedaan sikap etis seseorang. Namun menurut Forst (p.6), kedua perspektif itu tidak bisa dipisahkan begitu saja, dan dalam diskursus toleransi, dan dalam sejarah pemikiran para tokoh, kedua perspektif dipakai secara simultan.

Dalam diskursus toleransi, perspektif pertama mengimplikasikan rasionalisasi kekuasaan politik (*rationalisation of political power*), dan perspektif kedua mengimplikasikan rasionalisasi moralitas (*rationalisation of morality*). Dalam hal ini Forst mengaku dipengaruhi oleh rasionalisasi sosial yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas di dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*. Rasionalisasi kekuasaan politik artinya, bahwa dalam diskursus sejarah, otoritas negara berhasil membebaskan dirinya dari otoritas agama pada abad pertengahan. Sehingga, dengan semakin independennya

negara, prinsip toleransi mendapatkan legitimasi politik yang lebih kuat demi menjamin kebebasan warganya. Begitu pula kebijakan negara mengenai toleransi bukan saja dianggap sebagai penolakan terhadap aturan yang tidak toleran, tetapi juga dipandang sebagai kebijakan dari pemerintah yang dianggap rasional dan lebih rasional di banding kebijakan yang lain. Sehingga, ada pergeseran persepsi negara dan kekuasaan, dari negara yang ‘represif’ kepada ‘sikap mengayomi’, dan kekuasaan menjadi lebih produktif. Negara memberikan porsi kebebasan yang inklusif kepada warganya secara bertanggungjawab. Dengan demikian, kekuasaan mendapatkan justifikasi yang rasional, dan prinsip toleransi mendapatkan justifikasi politik yang kuat.

Sementara rasionalisasi moralitas, sebagai implikasi dari perspektif horisontal terhadap diskursus toleransi, merupakan upaya membangun argumen normatif bagi prinsip toleransi yang independen, memiliki basis filsafat moral yang kuat, yang menolak intoleransi dengan mengatasnamakan agama, negara maupun kepentingan sipil yang hierarkis. Argumen normatif bagi toleransi ini bukan saja independen terhadap agama, tetapi juga terhadap dalil normatif yang berasal dari model aliran moral yang lain berteori tentang kebaikan individu dan sosial. Argumen normatif sebagai justifikasi

toleransi ini juga tidak dapat dilepaskan terhadap penghargaan yang tinggi terhadap keragaman, pluralitas, dan refleksi dan pemahaman mendalam mengenai identitas manusia.

Bagian pertama buku yang berisi diskursus toleransi dalam sejarah ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan posisi toleransi, yang berada dalam ketegangan di antara dua wilayah: politik dan moralitas. Selain itu, juga sebagai pijakan untuk menginjak pada bagian kedua, yaitu sebagai basis untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan justifikasi toleransi yang telah dikembangkan dalam sejarah. Tujuannya adalah mencari landasan bagi bangunan teori yang konstruktif tentang teori toleransi yang, menurut Forst, “secara normatif memiliki derajat otonomi yang lebih mendasar sekaligus lebih tinggi, lebih reflektif, dan sistematis” dari sekedar konsepsi toleransi yang ada dalam sejarah, tapi tetap kompatibel, karena diawali dengan melihat ‘prinsip atau hak atas justifikasi”. (p.8)

### **Empat Konsepsi tentang Toleransi dalam Sejarah**

Menurut Rainer Forst, secara garis besar, toleransi dipahami dalam empat konteks: (i) konteks hubungan mayoritas-minoritas, (ii) eksistensi kelompok sosial dengan sesama, (iii) perwujudan norma-norma toleransi dan sikap toleran, dan (iv) toleransi dalam masyarakat multikultur.

Toleransi juga dapat dilihat dalam konteks hubungan vertikal (negara dan warganya) dan hubungan horizontal (warga dengan sesamanya).

Pandangan paling klasik menunjukkan bahwa toleransi dipakai dalam konteks hubungan mayoritas (kekuasaan) dan minoritas, antara mayoritas sebagai pemegang otoritas dan oposisi, komunitas 'liyan', kelompok berbeda, dan bentuk-bentuk minoritas lainnya. Toleransi dipahami sebagai *permission conception*. Dengan demikian, toleransi diartikan sebagai otoritas yang diberikan secara permisif kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat kelompok minoritas itu tetap menerima posisi kaum dominan sebagai mayoritas dan pemegang otoritas.

Pandangan kedua menempatkan toleransi pada konteks pencegahan konflik, dan menekankan pada subjek dan objek toleransi. Sehingga, toleransi dipandang sebagai *coexistence conception*, konsepsi dalam rangka ko-eksistensi subjek terhadap objek toleransi, yang bukan berposisi sebagai mayoritas-minoritas yang memiliki strata kuasa yang berbeda, melainkan pada relasi kesetaraan. Toleransi menjadi instrumen untuk menghindari konflik akibat satu kelompok memaksakan kehendak atau keinginannya sendiri. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah sikap saling menghormati kepen-

tingan yang lain agar tercipta kedamaian sosial.

Pandangan ketiga memandang toleransi dalam konteks norma yang mengatur berbagai kelompok yang secara fundamental berbeda satu sama lain, sehingga membutuhkan konsepsi kesetaraan moral-politik. Sehingga, toleransi dipandang sebagai konsepsi untuk menghargai pemikiran, keyakinan, gaya hidup, standar etis, dan budaya orang lain secara resiprokal (*toleration as respect conception*). Toleransi sebagai sikap menghargai ini memiliki dua model, "formal equality" dan "qualitative equality". Yang pertama dipakai dalam konteks hubungan antara ruang publik terhadap ruang privat, dimana keduanya harus saling menghargai, dengan penghargaan terhadap ruang publik dan terhadap ruang privat. Sedangkan model kedua dipakai dalam konteks penghargaan sesama warganegara negara dengan identitas dan karakter budaya yang berbeda tetapi menjadi warga politik yang setara.

Pandangan keempat melampaui ketiga konsepsi sebelumnya, yang menekankan penghargaan (*respect*) yang ditunjukkan dengan penerimaan konsepsi orang lain. Sehingga, toleransi dipandang sebagai *esteem conception*. Sikap toleran tidak hanya dimaknai dengan menghormati anggota kelompok budaya atau agama yang lain yang dipandang memiliki

kedudukan moral dan politik yang setara, melainkan menganggap bahwa mereka memang menarik, bernilai, patut dihargai, memberikan penghargaan etis yang lebih dalam, dan memiliki pertimbangan moral yang baik. Penghargaan etis yang lebih dalam ini juga ditunjukkan dengan penerimaan secara positif terhadap pandangan yang lain, bahkan meskipun kita mengetahui bahwa pandangan itu mengandung kekurangan dan kelemahan.

Forst sendiri mendukung konsepsi *respect conception*. Konsepsi ini dibangun di atas basis pengertian, penghormatan dan penghargaan terhadap yang lain, di dalam kesamaan otonomi, tetapi berbeda dalam hal identitas, keyakinan etis, pandangan moral tentang yang baik dan buruk, dan kebiasaan dalam praktik budaya mereka. Penghormatan dan penghargaan menjadi kata kunci bagi konsepsi ini. Secara politik, setiap warganegara memiliki otonomi dan kebebasan yang harus dilindungi, kesetaraan derajat, di bawah payung norma yang diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu budaya dan komunitas tertentu. Setiap kelompok semestinya membangun toleransi bersama (Forst, 2017).

### **Konstruksi Teori Toleransi**

Teori toleransi, pada bagian kedua (p.449-571), merupakan teori tentang toleransi yang berusaha ‘toleran’ terhadap

prinsip etika yang lain. Teori ini bukan sebuah konsepsi politik yang kompromistis atas doktrin-doktrin etis, melainkan konsepsi toleransi yang memiliki fundamen moral yang otonom sebagaimana dalam pikiran Immanuel Kant, yang dikembangkan dari konsepsi tertentu tentang rasio praktis dan otonomi moral. Dalam hal ini, Forst banyak dipengaruhi oleh argumen John Rawls. Dengan konstruksi teoritis tersebut, Forst membangun empat hal fundamental:

Pertama, teori justifikasi praktis berupa prinsip-prinsip rasio praktis, yang dapat dijadikan sebagai justifikasi bagi norma-norma moral tentang toleransi. Dengan justifikasi praktis, memungkinkan mengidentifikasi “toleransi sebagai nilai etis” dan sebagai “norma moral”. Dengan prinsip rasio praktis tersebut nantinya juga dapat dibedakan: 1) konsepsi toleransi yang mengandung kebaikan dari seseorang bagi dirinya sendiri yang dibenarkan sendiri tanpa reserve; 2) norma moral toleransi yang valid secara universal; 3) konsepsi tentang kebaikan yang patut dikritisi tetapi masih ditolerir karena tidak sampai pada norma immoral; 4) konsepsi-konsepsi toleransi yang tidak etis, dan bertentangan dengan prinsip rasio praktis. Forst berharap, dapat mengetahui sejauh mana prinsip “hormat terhadap seseorang sebagai bentuk toleransi” memiliki basis otonomi moral, dan sejauh mana sikap

toleran itu menjadi bagian dari keutamaan keadilan dan bagian keutamaan rasio praktis (*virtue of practical reason*).

Kedua, melalui teori tersebut, Forst juga ingin menyelidiki secara sistematis implikasi epistemologis dari sikap hormat sebagai ekspresi toleransi dan hubungannya dengan teori normatif. Apakah itu dikategorikan tindakan yang skeptis, apakah tindakan yang didasarkan pada kebenaran normatif yang relativistik, atau tindakan yang keliru, atau pluralistik, atau monistik taukah apa? Forst mendukung konsepsi epistemologis tentang sikap pribadi yang relatif, tanpa harus terjebak pada relativisme.

*“Seeing oneself and the world with tolerant eyes means being able to distinguish between what human beings can require of one another morally and what is perhaps much more important for them, namely, their conceptions of what makes a life worth living and good. And it means seeing that the latter is a topic of endless dispute, but one which need not place in question the validity of morality, the truth of one’s own convictions or the integration of a society. This insight is the accomplishment of reason for which the concept of toleration stands. Put in more abstract philosophical terms, it means correctly understanding the identity and difference of human beings”* (Forst, 2013:10-11).

Ketiga, Forst menyelidiki tentang sikap hormat sebagai bagian dari karakter utama dari pribadi yang toleran. Disini toleransi dipandang sebagai sebuah keutamaan (*a virtue*). Namun sikap toleransi tidak pasti otomatis menunjukkan

pribadi yang ideal, hanya saja pribadi tersebut memiliki pendirian yang ‘kuat’ secara spesifik di dalam dirinya, untuk mengambil sikap yang toleran, dan memiliki kemampuan untuk menjaga jarak dari diri yang lain dalam rangka memberikan penghormatan dan toleransi.

Terakhir, konsepsi tersebut akan diuji implikasinya dalam konteks politik dan demokrasi. Forst percaya, bahwa pendekatan yang diajukannya akan memungkinkan munculnya “teori toleransi kritis” (*critical theory of toleration*) yang bukan saja mampu menganalisis bentuk tindakan intoleransi, tetapi juga toleransi yang represif dan disipliner yang dilakukan oleh institusi politik. Hal ini relevan untuk melihat kejadian yang dialami kelompok etno-kultural dan kelompok agama minor, misalnya, atau kasus tentang seksualitas, atau bahkan terhadap kelompok politik yang ekstrim. Sejauh mana batas-batas yang dimungkinkan bagi mereka.

Studi toleransi yang dilakukan oleh Forst dalam buku ini bukan hanya menunjukkan penyelidikan sejarah yang kuat, bagaimana kemungkinan variasi ekspresi toleransi di masyarakat, sejauh mana batas-batas toleransi, tapi juga bagaimana justifikasi dan pemahaman umum terhadap toleransi itu sendiri. Studi ini melibatkan problem yang lebih kompleks dari itu, terkait hubungan antara

kekuasaan dan moralitas, hubungan antar agama, etika dan politik, konflik dalam etika, dan merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan terhadap konsepsi

moral yang kokoh. Buku ini layak dijadikan rujukan bagi studi agama dan kebudayaan.

\*\*\*

**Referensi Tambahan:**

Forst, Reiner (2017), "Toleration" dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (online) <https://plato.stanford.edu/entries/toleration/>, Dipublikasikan pertama kali pada Februari 23, 2007; dan revisi substantif pada Jul 12, 2017